

PENILAIAN			PENJELASAN	Pilihan Jawaban		Nilai	%	Bukti	saran
<b>A.</b>	<b>PROSES (60)</b>								
	<b>I.</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN (5)</b>	5,0			<b>4,22</b>	<b>84,44%</b>		
		<b>1 Tim Reformasi Birokrasi (1)</b>	<b>1,0</b>			<b>0,78</b>	<b>78,00%</b>		
		a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	A/B/C	A	1		SK No: Kep/692/IX/2011	Revisi SK
		b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	B	0,67		Laporan Rentinjut Tahun 2014	
		c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	B	0,67		Lap eva monev tahun 2014	
		<b>2 Road Map Reformasi Birokrasi (1)</b>	<b>1,0</b>			<b>0,93</b>	<b>93,40%</b>		
		a. Road Map telah disusun dan diformalkan	Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Y/T	Ya	1		Dokumen Road Map 2015-2019	
		b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan	a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A/B/C	A	1		a. Dokumen Road Map 2015-2019 b. Surat Asrenum Pang TNI tanggal 30 Oktober 2014 ttg Undangan Rapat	
		c. Road Map telah mencakup "quick win"	a. <i>Quick wins</i> ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. <i>Quick wins</i> ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A/B/C	A	1		Dokumen Road Map 2015-2019	
		d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	A/B/C/D	A	1		Pokja Penyusunan Road Map	
		e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	A/B/C/D	B	0,67		Laporan giat sosialisasi	Cakupan sosialisasi diperluas
		<b>3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)</b>	<b>2,0</b>			<b>1,81</b>	<b>90,57%</b>		

		a.	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	A/B/C/D	A	1		a. Rapat Koordinasi PMPRB, b. laporan PMPRB U.O TNI dan angkatan.	perbaikan mekanisme untuk tahun berikutnya
		b.	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	A/B/C/D	B	0,67		a. Rapat Koordinasi PMPRB, b. laporan PMPRB U.O TNI dan angkatan.	meningkatkan komunikasi
		c.	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB	a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan	A/B/C/D	A	1		a. Surat Asrenum No: 13/Und-5/II/2015 ttg Undangan PMPRB, b. Surat Asrenum ttg Nama Assessor Tiap Bidang.	meningkatkan pelatihan
		d.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.	A/B/C/D	B	0,67		a. Surat Asrenum No: 13/Und-5/II/2015 ttg Undangan PMPRB, Tim Assessor sampai tingkat Angkatan b. Surat Asrenum ttg Nama Assessor Tiap Bidang, Tim Assessor sampai tingkat Angkatan	meningkatkan pelatihan
		e.	Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi	A/B/C	A	1		Reviu oleh koordinator	
		f.	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor	A/B/C	A	1		Lap giat Tim PMPRB	
		g.	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	A	1		a. Lap giat Tim PMPRB, b. Rentinjut, c. lap eva rentinjut tahun 2014	
		<b>4</b>	<b>Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)</b>	<b>1,0</b>			<b>0,70</b>	<b>69,67%</b>		
		a.	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	B	0,67		Komitmen Pimpinan TNI dalam Reformasi Birokrasi dengan menghadirkan Nara Sumber dari Kem PAN dan KPK dalam berbagai kegiatan seperti Sosialisasi LHKPN, Rakor Rengar TNI 2015 dan Sosialisasi ASN.	

		b.	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan		a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	A/B/C/D/E	B	0,75		majalah, website, buletin, majalah dinding, TV Puspueen TNI dan Radio	
		c.	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>		a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	A/B/C/D	B	0,67		a. ST tentang Pembentukan Agent of Change, b. SP Kasad tentang <i>Agent of change</i> di tingkat Mabes AD, c. SP <i>Agent of Change</i> di Kotama.	Cakupan sosialisasi diperluas
II.	<b>PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)</b>			5,0				<b>3,75</b>	<b>75,00%</b>		
	1	<b>Harmonisasi (2,5)</b>		<b>2,5</b>				<b>1,25</b>	<b>50,00%</b>		
		a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron		a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	A/B/C	B	0,5		Program Legislasi TNI tahun 2010-2014	
		b.	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron		a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	A/B/C	B	0,5		Revisi berbagai Perpang misalnya Perpang Nomor 18 tahun 2013 dan Perpang Nomor 23 tahun 2013	
	2	<b>Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (2,5)</b>		<b>2,5</b>				<b>2,50</b>	<b>100,00%</b>		
		a.	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi		a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	A/B/C/D	A	1		Perpang Nomor 174 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI	
		b.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan		a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	A/B/C	A	1		Kep Pang TNI nomor Kep/950/XII/2011	
III.	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)</b>			6,0				<b>4,18</b>	<b>69,61%</b>		
	1.	<b>Evaluasi (3)</b>		<b>3,0</b>				<b>2,17</b>	<b>72,22%</b>		
		a.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	A/B/C	B	0,5		a. Perpang No: 176/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penataan Organisasi. b. Naskah akademik ttg validasi organisasi	Cakupan evaluasi diperluas

			b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi	A/B/C	B	0,5		Naskah akademik ttg validasi organisasi	Cakupan evaluasi diperluas
			c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja	A/B/C	A	1		Naskah akademik ttg validasi organisasi	Cakupan evaluasi diperluas
			d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja	A/B/C	B	0,5		Naskah akademik ttg validasi organisasi	Cakupan evaluasi diperluas

		e.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja	A/B/C	B	0,5		Naskah akademik ttg validasi organisasi	Cakupan evaluasi diperluas
		f.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja	A/B/C	B	0,5		Naskah akademik ttg validasi organisasi	Cakupan evaluasi diperluas
		g.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja	A/B/C	A	1		Naskah akademik ttg validasi organisasi	
		h.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Y/T	Ya	1		Naskah akademik ttg validasi organisasi	
		i.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Y/T	Ya	1		Naskah akademik ttg validasi organisasi	
	<b>2.</b>	<b>Penataan (3)</b>		<b>3,0</b>			<b>2,01</b>	<b>67,00%</b>		
			Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A/B/C/D	B	0,67		Validasi organisasi terencana	

IV.	PENATAAN TATALAKSANA (5)		5,0				3,84	76,85%		
	1	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)	1,5				1,25	83,50%		
		a. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C/D	A	1		POP Satker, misalnya SUM TNI	
		b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	A	1		SOP/Prosmekhubja misalnya; Kohanudnas	
		c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A/B/C/D	B	0,67		SOP/Prosmekhubja Satker	
		d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi		a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	B	0,67		Revisi SOP Srenum TNI hasil Evaluasi	
	2	E-Government (2)	2,0				1,51	75,25%		
		a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi		Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Y/T	Ya	1		Dokumen rencana e-government	
		b. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)		a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A/B/C/D	B	0,67		LPSE, e-LAKIP, e-recruitment	

		c.	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A/B/C/D	B	0,67		<a href="http://ppid.tni.mil.id">http://ppid.tni.mil.id</a>	
		d.	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A/B/C/D	B	0,67		LPSE, e-LAKIP, e-recruitment	
	<b>3</b>	<b>Keterbukaan Informasi Publik (1,5)</b>		<b>1,5</b>			<b>1,09</b>	<b>72,33%</b>		
		a.	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Y/T	Ya	1		<a href="http://ppid.tni.mil.id">http://ppid.tni.mil.id</a>	
		b.	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	A/B/C/D	B	0,67		<a href="http://ppid.tni.mil.id">http://ppid.tni.mil.id</a>	
		c.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	B	0,5		Lap monev 2013	
<b>V.</b>	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)</b>		<b>15,0</b>				<b>14,02</b>	<b>93,45%</b>		
	<b>1</b>	<b>Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (1)</b>		<b>1,0</b>			<b>0,87</b>	<b>86,80%</b>		
		a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C/D	B	0,67		a. Perpang no: 93/XII/2011 tentang Bujukmin ABK, b. Laporan ABK	

		b.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C/D	B	0,67		a. Naskah Renbut, b. ST/1148/2013 tgl 18 Okto 2013 ttg Alokasi Penyediaan prajurit	
		c.	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Y/T	Ya	1		Dokumen penempatan personel	
		d.	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Y/T	Ya	1		Renstra personel	
		e.	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A/B/C/D	A	1		Dokumen hasil analisa formasi personel	
		<b>2</b>	<b>Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (2)</b>	<b>2,0</b>			<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>		
		a.	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A/B/C	A	1		<a href="http://rekrutmen-tni.mil.id">http://rekrutmen-tni.mil.id</a>	
		b.	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti ( <i>online</i> )	Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Y/T	Ya	1		<a href="http://rekrutmen-tni.mil.id">http://rekrutmen-tni.mil.id</a>	
		c.	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Y/T	Ya	1		<a href="http://rekrutmen-tni.mil.id">http://rekrutmen-tni.mil.id</a>	
		d.	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Y/T	Ya	1		Laporan evaluasi penerimaan	
		e.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Y/T	Ya	1		<a href="http://rekrutmen-tni.mil.id">http://rekrutmen-tni.mil.id</a>	



		3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)	1,0			0,75	75,17%		
			a. Telah ada standar kompetensi jabatan		Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Y/T	Ya	1		Perpang No/138/XII/2011
			b. Telah dilakukan asesment pegawai		a. Telah dilakukan asesment kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan asesment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan asesment kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan asesment pegawai	A/B/C/D	A	1		Dokumen hasil seleksi Dikbangum
			c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	B	0,67		a. Perpang No 43/VII/2009 ttg Juknis kesempatan Prajurit untuk mengembangkan kemampuan, b. Juknis Pendidikan prajurit, c. Laporan Pelaksanaan Progja tahun 2014 bidang pendidikan
			d. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi		a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	B	0,67		a. Renc bang pers, b. rencana tindak lanjut bidang SDM tahun 2014
			e. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	B	0,67		Renc induk pendidikan personel
			f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala		a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C	B	0,5		Laporan kegiatan pelaksanaan penyediaan prajurit

		<b>4</b>	<b>Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)</b>	<b>6,0</b>			<b>6,00</b>	<b>100,00%</b>		
			a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan		ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Y/T	Ya	1		a.Mekanisme wanjak, b. Bahan sidang Wanjak.
			b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan		a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	A/B/C/D	A	1		a.Mekanisme wanjak, b. Bahan sidang Wanjak, c. Kep Pang Ttg Penempatan Jabatan
			c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif		Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Y/T	Ya	1		a.Mekanisme wanjak, b. Bahan sidang Wanjak.
			d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen		Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Y/T	Ya	1		a.Mekanisme wanjak, b. Bahan sidang Wanjak.
			e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka		Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Y/T	Ya	1		c. Kep Pang Ttg Penempatan Jabatan
		<b>5</b>	<b>Penetapan kinerja individu (2)</b>	<b>2,0</b>				<b>1,48</b>	<b>74,00%</b>	
			a. Penerapan Penetapan kinerja individu		a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan	A/B/C/D	B	0,67		Lap kinerja PNS
			b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	B	0,67		Lap kinerja PNS

		c.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	<p>a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p> <p>b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p> <p>c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p> <p>d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p>	A/B/C/D	B	0,67		Buku Penilaian Kinerja Individu	
		d.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	<p>a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan</p> <p>b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan</p> <p>c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran</p> <p>d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan</p> <p>e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan</p>	A/B/C/D/E	C	0,5		Lap Penilaian kinerja	
		e.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	<p>a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala</p> <p>b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala</p> <p>c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu</p>	A/B/C	A	1		Lap Penilaian kinerja	
		f.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	<p>a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai</p> <p>b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai</p> <p>c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai</p> <p>d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai</p>	A/B/C/D	A	1		Lap Penilaian kinerja	
		g.	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	<p>a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai</p> <p>b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai</p> <p>c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai</p> <p>d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai</p>	A/B/C/D	B	0,67		Lap Penilaian kinerja	
		<b>6</b>	<b>Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1)</b>	<b>1,0</b>			<b>1,00</b>	<b>100,00%</b>		
		a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Y/T	Ya	1		Kep Pang No 969/XII/2013 ttg Jukmin tata cara penjatuhan hukuman dis	
		b.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	<p>a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi</p> <p>b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi</p> <p>c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi</p> <p>d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi</p>	A/B/C/D	A	1		a.Laporan Gaktib tahun 2014, b. Penjatuhan hukuman disiplin.	
		c.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	<p>a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala</p> <p>b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala</p> <p>c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi</p>	A/B/C	A	1		Laporan Gaktib tahun 2014	

		d. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> )	a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada unit organisasi	A/B/C/D	A	1		a.Laporan Gaktib tahun 2014, b. Penjatuhan hukuman disiplin.	
	<b>7</b>	<b>Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)</b>	<b>1,0</b>			<b>1,00</b>	<b>100,00%</b>		
		a. Informasi faktor jabatan telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Y/T	Ya	1		Perpang ttg Kompetensi Jab	
		b. Peta jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A/B/C/D	A	1		POP tiap Satker	
		c. Kelas jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	A/B/C/D	A	1		a.Perpang Orgas Satker, b. Perpang 126/X/2011 ttg Bujukmin Analisa Jabatan	
	<b>8.</b>	<b>Sistem Informasi Kepegawaian (1)</b>	<b>1,0</b>			<b>0,92</b>	<b>91,75%</b>		
		a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Y/T	Ya	1		Sisinfopers	
		b. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Y/T	Ya	1		Sisinfopers	
		c. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A/B/C/D	B	0,67		Up date Sisinfopers	
		d. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Y/T	Ya	1		Mekanisme wanjak	

VI.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)		6,0				4,46	74,40%		
	1	Keterlibatan pimpinan (2)	2,0				2,00	100,00%		
		a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	A	1		Naskah Renstra dan Tim Pokja	
		b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	A	1		Naskah Renstra dan Tim Pokja	
		c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	A	1		a. Laporan eva Kinerja berkala, b. Laporan Daya serap tiap Triwulan	
	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)	4,0				2,46	61,60%		
		a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	B	0,67		a. Surat perintah Diklat, b. laporan Bimbingan Teknis LAKIP	Peningkatan Diklat
		b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun		Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Y/T	Ya	1		Perpang 42/VI/2011 ttg Juklak Eva LAKIP TNI	
		c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik		a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	A/B/C/D	C	0,33		e-LAKIP	

		d.	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	A/B/C/D	C	0,33		e-LAKIP	Memperbaiki sistem
		e.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	B	0,75		entry data kinerja	Memperbaiki sistem
	<b>VII.</b>	<b>PENGUATAN PENGAWASAN (12)</b>		12,0			<b>11,13</b>	<b>92,72%</b>		
	<b>1</b>	<b>Gratifikasi (1,5)</b>		<b>1,5</b>			<b>1,50</b>	<b>100,00%</b>		
		a.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Y/T	Ya	1		Perpang No 15/2014	
		b.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	A/B/C	A	1		Lap public campaign dan sosialisasi mis. Pameran Hari Anti Korupsi	
		c.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Y/T	Ya	1		Laporan kegiatan Penanganan Gratifikasi tanggal 17 Feb 2015	
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Y/T	Ya	1		Laporan kegiatan Penanganan Gratifikasi tanggal 17 Feb 2015	
		e.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Y/T	Ya	1		Laporan kegiatan Penanganan Gratifikasi tanggal 17 Feb 2015	
	<b>2</b>	<b>Penerapan SPIP (1,5)</b>		<b>1,5</b>			<b>1,50</b>	<b>100,00%</b>		
		a.	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Y/T	Ya	1		Perpang No 16/2014	
		b.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian	A/B/C	A	1		Sprint ttg SPIP	
		c.	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D	A	1		Surat Irjen TNI No B/1003-05/08/01/ljt ttg Esenasi hasil Wasrik th 2014	

		d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A/B/C/D	A	1		Surat Irjen TNI No B/1003-05/08/01/Itj ttg Esenasi hasil Wasrik th 2014	
		e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A/B/C/D	A	1		Lap public campaign dan sosialisasi mis. Pameran Hari Anti Korupsi	
		f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A/B/C	A	1		Laporan Monev bidang Penguatan Pengawasan	
	<b>3</b>	<b>Pengaduan Masyarakat (2)</b>	<b>2,0</b>			<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>		
		a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Y/T	Ya	1		Skep/281/VIII/2006 ttg Juknis penanganan Dumas	
		b. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	A	1		Laporan Semester II Tahun 2014 Dumas di Lingkungan TNI (Surat Nomor R/23-25/01/01/Itj tanggal 13 Januari 2015	
		c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1		Dokumen Tindak lanjut Dumas	
		d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1		Laporan Semester II Tahun 2014 Dumas di Lingkungan TNI (Surat Nomor R/23-25/01/01/Itj tanggal 13 Januari 2015	
		e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Y/T	Ya	1		Laporan Semester II Tahun 2014 Dumas di Lingkungan TNI (Surat Nomor R/23-	

		<b>4</b>	<b>Whistle-Blowing System (1,5)</b>	<b>1,5</b>			<b>1,50</b>	<b>100,00%</b>		
		a.	Telah terdapat <i>Whistle Blowing System</i>		Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Y/T	Ya	1		Perpang No 17/2014
		b.	<i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan		a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi	A/B/C/D	A	1		Lap public campaign dan sosialisasi mis. Pameran Hari Anti Korupsi
		c.	<i>Whistle Blowing System</i> telah diimplementasikan		Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Y/T	Ya	1		dokumen pelaksanaan
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>		a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	A/B/C	A	1		dokumen Evaluasi pelaksanaan
		e.	Hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti		a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1		Tindak lanjut hasil evaluasi
		<b>5</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)</b>	<b>1,5</b>				<b>1,50</b>	<b>100,00%</b>	
		a.	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan		Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Y/T	Ya	1		Perpang No 18/2014
		b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	A/B/C/D	A	1		a.Lap public campaign dan sosialisasi mis. Pameran Hari Anti Korupsi, b. sosialisasi internal tanggal 7 Oktober 2014
		c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Y/T	Ya	1		dokumen pelaksanaan



		d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1		dokumen Evaluasi pelaksanaan	
		e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1		Tindak lanjut hasil evaluasi	
	<b>6</b>	<b>Pembangunan Zona Integritas (2,5)</b>	<b>2,5</b>			<b>1,75</b>	<b>70,00%</b>		
		a. Telah dilakukan penancangan zona integritas	Ya, apabila terdapat Dokumen Penancangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Y/T	Ya	1		Perpang No 19/2014	
		b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Y/T	Ya	1		Kep Pang TNI No Kep/832/X/2014 tgl 31 Oktober 2014	
		c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A/B/C	A	1		Implementasi Kep Pang 832/X/2014	
		d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	0,5		Dok Evaluasi ZI	
		e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	A/B/C	C	0		Kep Pang TNI No Kep/832/X/2014 tgl 31 Oktober 2014	

		<b>7</b>	<b>Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)</b>	<b>1,5</b>				<b>1,38</b>	<b>91,75%</b>		
			a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan		a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A/B/C/D	A	1		Dokumen tindak lanjut rekomendasi APIP	
			b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.		a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	A/B/C/D	A	1		DSP dan Skep Penempatan	
			c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai		a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	A/B/C/D	B	0,67		Progja 2014 dan 2015	
			d. APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko		a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	A/B/C/D	A	1		Lap kegiatan Wasrik TNI	
			<b>VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)</b>	<b>6,0</b>				<b>4,86</b>	<b>81,02%</b>		
		<b>1</b>	<b>Standar Pelayanan (1)</b>	<b>1,0</b>				<b>0,67</b>	<b>66,80%</b>		
			a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Y/T	Ya	1		Perpang No 24 Tahun 2012	
			b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	A/B/C/D	B	0,67		facebook : puspen tni twitter : @puspen_tni website : <a href="http://ppid.tni.mil.id">http://ppid.tni.mil.id</a>	

		c.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	<p>a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan</p> <p>b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan</p> <p>c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan</p> <p>d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan</p>	A/B/C/D	B	0,67		SOP pelayanan kesehatan	
		d.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	<p>a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders</p> <p>b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders</p> <p>c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan</p>	A/B/C	B	0,5		Laporan reviu	
		e.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	<p>a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala</p> <p>b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala</p> <p>c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP</p>	A/B/C	B	0,5		Revisi SOP	
		<b>2</b>	<b>Budaya Pelayanan Prima (1)</b>	<b>1,0</b>			<b>0,77</b>	<b>76,80%</b>		
		a.	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	<p>a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p>	A/B/C/D	B	0,67		Laporan Sosialisasi	meningkatkan sosialisasi
		b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	<p>a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)</p> <p>b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)</p> <p>c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media</p>	A/B/C	A	1		facebook : puspen tni twitter : @puspen_tni website : <a href="http://ppid.tni.mil.id">http://ppid.tni.mil.id</a> , majalah, radio, tv Puspen TNI dll	

		c.	Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	<p>a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan</p> <p>b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan</p> <p>c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar</p>	A/B/C	B	0,5		Skep Panglima ttg Pemberian KPLB kepada prajurit berprestasi (Tim Selam SAR)	
		d.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	<p>a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu</p> <p>b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu</p> <p>c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu</p> <p>d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu</p>	A/B/C/D	B	0,67		SOP pelayanan kesehatan	
		e.	Terdapat inovasi pelayanan	Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Y/T	Ya	1		SOP pelayanan kesehatan	
		<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pengaduan (1,5)</b>	<b>1,5</b>			<b>1,20</b>	<b>80,00%</b>		
		a.	Terdapat media pengaduan pelayanan	Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Y/T	Ya	1		<a href="http://ppid.tni.mil.id">http://ppid.tni.mil.id</a>	
		b.	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	<p>a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif</p> <p>b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya</p> <p>c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan</p>	A/B/C	B	0,5		SOP pengaduan Online <a href="http://ppid.mil.id">http://ppid.mil.id</a>	
		c.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Y/T	Ya	1		Puspen TNI	
		d.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	<p>a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan</p> <p>b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan</p> <p>c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan</p> <p>d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan</p>	A/B/C/D	A	1		Tindaklanjut pelayanan pengaduan	

		e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	A/B/C	B	0,5		dokumen Evaluasi pelaksanaan	
	<b>4</b>	<b>Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)</b>	<b>1,5</b>			<b>1,34</b>	<b>89,00%</b>		
		a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C	A	1		Survei Online PPIID	
		b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	Y/T	Ya	1		<a href="http://ppid.tni.mil.id">http://ppid.tni.mil.id</a>	
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A/B/C/D	B	0,67		Dokumen tindak lanjut	
	<b>5</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)</b>	<b>1,0</b>			<b>0,89</b>	<b>89,00%</b>		
		a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Y/T	Ya	1		Dokumen	
		b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	A/B/C/D	B	0,67		Aplikasi TI	
		c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	1		Performance TI SPSE versi 3.6 menjadi Versi 4	
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>						<b>50,46</b>			

B. HASIL (40)									
I.		<b>KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)</b>	<b>20,0</b>				<b>13,42</b>	<b>67,1%</b>	
	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)	14,0	Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0-100	61,55	<b>8,62</b>	<b>61,55%</b>	Nilai SAKIP dari Kem PAN dan RB
	2.	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)	6,0	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi	0-5	4	<b>4,80</b>	<b>80,00%</b>	Laporan Survei Internal
II.		<b>PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)</b>	<b>10,0</b>				<b>7,38</b>	<b>73,75%</b>	
	1.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)	7,0	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi	0-4	2,5	<b>4,38</b>	<b>62,50%</b>	Survei LSI
	2.	Opini BPK (3)	3,0	Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian	<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	Opini BPK
III.		<b>KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)</b>	<b>10,0</b>				<b>8,00</b>	<b>80%</b>	
	1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (1)	10,0	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	0-4	3,2	<b>8,00</b>	<b>80,00%</b>	Survei Online
<b>TOTAL HASIL</b>			<b>40,0</b>				<b>28,79</b>	<b>71,98%</b>	
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>							<b>79,25</b>		

Jakarta,       Maret 2015  
Kepala Staf Umum TNI  
selaku  
Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI,

Paraf:

1. Asrenum: vide draft
2. Koorsahli: vide draft
3. Asops : vide draft
4. Aspers : vide draft
5. Aslog : vide draft
6. Aster : vide draft

7. Askomlek : vide draft
8. Wairjen : vide draft
9. Kababinkum : vide draft
10. Kapusinfohahta: vide draft
11. Kasetum :

Dede Rusamsi, S.E., M.M.  
Marsekal Madya TNI

